

IMPLEMENTASI PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLUS (Studi Penelitian Di Kelurahan Setonopande Kota Kediri)

**Imam Fachruddin*¹⁾, *Widyameta Nur Kurniawati*²⁾

1) 2) Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

*Email Korespondensi: widyametank@gmail.com

Submitted: 20-12-2023 | Accepted: 27-05-2024 | Published: 28-05-2024

Kata Kunci:
*Implementasi;
 Pemberdayaan
 Masyarakat;
 Prodamas Plus*

Abstrak

Prodamas selain melakukan desain ulang, Prodamas mempunyai enam bidang kemajuan, bidang landasan, bidang moneter, bidang sosial-sosial, bidang pelatihan, bidang kesejahteraan, bidang kepemudaan, yang mengarah pada perluasan kerjasama bidang lokal yang dinamis, bekerja sama, mengartikulasikan kebutuhan daerah setempat, pengembangan lebih lanjut gagasan kerangka ekologi di tingkat RT, pemahaman bantuan pemerintah keuangan daerah yang dikembangkan diatur dalam Pedoman Ketua Kota Kediri No 23/2020 tentang Aturan Khusus Penyelenggaraan Sistem Penguatan Daerah Selain Daerah. Penelitian bertujuan mendiskripsikan dan menganalisis implementasi prodamas plus di Kelurahan Setonopande Kota Kediri, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan prodamas plus. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara kepada informan terpilih yaitu Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Setonopande, Sekretaris Kelurahan Setonopande, Ketua RT 04 RW 02 Kelurahan Setonopande, Ketua Pokmas Tangguh Kelurahan Setonopande. Teknik analisis data menggunakan tiga cara : (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) Penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Prodamas Plus yang dilaksanakan oleh Kelurahan Setonopande Kota Kediri sudah berjalan dengan baik dengan melaksanakan sosialisasi, memfasilitasi, mengkoordinasikan, pengendalian, pemantauan prodamas plus meskipun masih ada sedikit hambatan dimasyarakat kurang ikut serta berpartisipasi, akan tetapi tetap berjalan sesuai dengan tujuan serta manfaatnya dapat terlihat dari aspek komunikasi antar aktor pelaksana, aspek sumber daya, aspek disposisi, struktur birokrasi.

Keywords:
*Implementation;
 community
 empowerment;
 Prodamas plus*

Abstract

Prodamas plus upgrading from Prodamas has six areas of development, infrastructure, economy, socio-culture, education, health, youth, aims to increase active community participation, facilitate, articulate community needs, improve environmental infrastructure at the RT level, realise community economic welfare in development regulated in Kediri Mayor

Regulation Number 23 of 2020 concerning Technical Guidelines for the Implementation of the Plus Community Empowerment Program. The research aims to describe and analyse the implementation of prodamas plus in Setonopande Village, Kediri City, as well as supporting factors and inhibiting factors in the implementation of prodamas plus activities. This research uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques included interviews with selected informants, namely the Head of Economic Development and Community Empowerment Section of Setonopande Village, Secretary of Setonopande Village, Head of RT 04 RW 02 Setonopande Village, Head of Pokmas Tangguh Setonopande Village. The data analysis technique uses three methods: (1) Data reduction, (2) Data presentation, (3) Conclusion drawing. The results showed that the implementation of the Prodamas Plus policy carried out by Setonopande Village, Kediri City has gone well by carrying out socialisation, facilitating, coordinating, controlling, monitoring prodamas plus although there are still a few obstacles in the community less participate, but it still runs in accordance with the objectives and benefits can be seen from the aspects of communication between implementing actors, resource aspects, disposition aspects, bureaucratic structure.

PENDAHULUAN

Program pemberdayaan masyarakat plus atau Prodamas Plus merupakan perombakan dari Prodamas yang sudah naik kelas, sebenarnya bertujuan agar ada beberapa peningkatan program dan nilai anggaran, yaitu Prodamas Rp 50 juta per RT, sedangkan Prodamas Selain Rp 100 juta untuk setiap. Prodamas Plus lebih diarahkan untuk mendukung RPJMD Kota Kediri 2020-2024. Perbedaan Prodamas yang hanya mencakup tiga bidang: kerangka kerja, sosial, dan keuangan, di Prodamas Selain terdapat tiga bidang atau lebih, tepatnya: pelatihan, kesejahteraan, dan pemuda. Perubahan proporsi anggaran per bidang yaitu bidang infrastruktur 25%-40%, bidang sosial budaya maksimal 20%, bidang ekonomi maksimal 30%, bidang kesehatan maksimal 50%, bidang pendidikan maksimal 20%, bidang kepemudaan maksimal 10%.

Mengakui kemajuan yang bermanfaat memerlukan perhatian dan kerja seluruh wilayah setempat, baik komponen suprastruktur maupun infrastruktur. Komponen ini menyangkut kewenangan publik sebagai pembantu pengaturan, pelaksanaan dan pengelolaan, serta upaya untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara keseluruhan. Prodamas Selain memiliki empat aturan yang harus dijalankan.

Keempat standar ini bersifat lugas, partisipatif, bertanggung jawab, dan dapat dipertahankan. Prodama juga mempunyai jiwa memperluas kontribusi daerah, khususnya dalam pelaksanaannya (Ahmad Farhan, 2017).

Dalam melaksanakan Prodama Selain itu ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, misalnya perlu adanya perluasan usulan latihan, menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antar RT dan RW, khususnya pada latihan yang bersifat lintas RT, Lurah bertanggung jawab dalam melaksanakan Prodama Selanjutnya, di wilayah Setonopande yang terdiri dari 4 RW dan 28 RT, dengan membangun komunikasi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat (Pokmas) dan Prodama serta komponen mitra. Dengan penjadwalan dan pelaksanaan rebug warga agar tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat (Ahmad Farhan, 2017). Proses percepatan pembangunan apakah implementasi kebijakan prodama plus mampu mewujudkan tujuannya untuk memfasilitasi sarana prasarana, meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan untuk mendorong masyarakat dalam pembangunan serta adakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat plus (Prodama Plus) di Kelurahan Setonopande Kota Kediri (Sutrisno, 2005).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengumpulkan informasi, mendeskripsikan, menangkap fakta dengan apa adanya tentang suatu objek, menguraikan, dan menganalisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sugiyono, 2017).

Adapun jenis penelitian kualitatif ini adalah untuk mengurus masalah penelitian, memberikan jawaban terhadap rencana masalah yang telah diajukan dalam penelitian serta bahan untuk memenuhi kebutuhan dan ide-ide yang berguna untuk pengaturan kebijakan berikutnya. Dapat dikatakan lebih memadahi untuk diterapkan dalam Mendeskripsikan dan Menganalisis Implementasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus di Kelurahan Setonopande Kota Kediri, serta

faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan prodamas plus di Kelurahan Setonopande Kota Kediri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Walikota Kediri No 23/2020 (Studi Penelitian Di Kelurahan Setonopande Kota Kediri)

Pemerintah Kota Kediri mulai mengembangkan salah satu program unggulan yang telah berjalan yaitu Prodamas menjadi Prodamas Plus dalam rangka menumbuhkembangkan, menggerakkan, dan mendorong partisipasi masyarakat. Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat atau Prodamas Selain mempunyai beberapa kesulitan, koordinasi yang baik antar seluruh komponen harus ditingkatkan mulai dari keinginan hingga pelaksanaannya. Dalam program ini, Pemerintah Kota Kediri mengucurkan dana sebesar Rp.100 Juta kepada masing-masing RT, dengan komposisi bidang infrastruktur 25%-40%, bidang sosial budaya maksimal 20%, bidang ekonomi maksimal 30%, bidang kesehatan maksimal 50%, bidang pendidikan maksimal 20%, bidang kepemudaan maksimal 10% (Djani et al., 2021).

Menurut George C. Edwards III dalam (Dwidjowijoto, 2006), terdapat empat variabel yang sangat menentukan untuk pencapaian tujuan keberhasilan dari kegiatan pelaksanaan implementasi suatu kebijakan, :

a. Komunikasi

Komunikasi dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Plus di Kelurahan Setonopande dengan adanya sosialisasi agar mempunyai feedback yang sangat baik. Terlihat antusiasme warga Kota Setonopande terhadap program Prodamas Plus sangat tinggi karena mereka merasa langsung terhubung dengan kemajuan lingkungannya, dengan uang 100 juta untuk setiap RT mereka bisa merencanakan dan membangun sendiri. keadaan saat ini sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Untuk situasi ini komunikasi dilakukan dengan cara bertemu secara tulus dan selanjutnya komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan agar terhindar dari miskomunikasi antar sub-wilayah, terlaksananya pertemuan-pertemuan dan juga antar wilayah.

Reaksi kelompok masyarakat terhadap sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan baik ketua RT maupun lurah diundang oleh warga yang dengan penuh

semangat mengundang Prodamas Plus. Sosialisasi yang dilakukan oleh kelurahan dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh kelurahan, juga dapat mengingat sedikit sosialisasi untuk Prodamas plus di setiap kesempatan agar semua warga tak henti-hentinya memahami betapa pentingnya Prodamas Plus itu, dan di dalam kegiatan pertemuan tersebut ada perwakilan dari kelurahan untuk mendampingi kegiatan bersama warga sekitar.

Selain itu, hal ini dilakukan agar baik pelaksana maupun pekerja di lapangan dapat menjalankan program sesuai dengan yang tidak ditetapkan, tetapi, masih ada beberapa warga yang tidak bisa mengikuti rembug karena sedang bekerja atau kesibukan lainnya, dan ada juga memang masih kurang melibatkan diri, tidak perduli akan adanya dalam program ini padahal dengan ikut serta dan tidak mau berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasi dan mungkin ada kebutuhan yang ingin diusulkan dalam kegiatan ini yang memang tujuannya seluruh manfaatnya diperuntukan kepada masyarakat.

b. Sumberdaya

Sumberdaya dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Plus di Kelurahan Setonopande berjalan dengan baik, Rencana belanja merupakan bagian penting dalam menjalankan suatu program, rencana belanja merupakan aset untuk membantu berjalannya suatu program. Rencana anggaran juga dapat dikatakan sebagai salah satu aset dalam mendukung dan memahami tujuan pelaksanaan program, kemudahan anggaran dalam memenuhi kebutuhan material untuk melaksanakan program pengembangan kerangka di Kelurahan Setonopande, rencana keuangan juga merupakan hal yang penting. diharapkan dapat memenuhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, mengingat pelaksanaan perbaikan program akan dilakukan. Hal ini dapat dipahami dengan asumsi adanya tenaga kerja yang diikutsertakan. Kemampuan pekerja dalam program ini disesuaikan dengan target yang mendasarinya dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat plus.

Dalam program penguatan wilayah ini selain dengan menggunakan sistem perencanaan *bottom up* banyak sekali SDM yang dilibatkan, karena sistem perencanaan *bottom up* mencakup semua kalangan, mulai dari lapisan bawah hingga lapisan atas. Pertemuan-pertemuan yang terlibat dalam pelaksana Prodamas Selain tergabung dalam Prodamas tim pengendali Prodamas Plus

(tingkat kota), tim koordinasi kecamatan (tingkat kecamatan), tim fasilitas kecamatan (tingkat kecamatan), swakelola (pokmas).

c. Disposisi

Disposisi dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Plus di Kelurahan Setonopande bahwa pastinya tidak ada kecenderungan yang patut disesalkan atau bersikap negatif di kalangan pelaksana, hal ini karena kelompok pelaksana mengetahui bahwa pembangunan pondasi bergantung pada rekomendasi daerah sebagaimana diharapkan, sehingga pelaksanaannya juga didasarkan pada apa yang telah direncanakan. Untuk menjalankan program tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri tersebut.

Sikap para pelaksana strategi akan mempunyai dampak yang besar dalam implementasi kebijakan Prodama plus Kota Kediri untuk situasi ini tergantung pada persepsi yang dibuat oleh para ahli di bidangnya, kecenderungan atau mental para pelaksana strategi khususnya Kelurahan Setonopande yang telah mendukung mereka dalam menyelesaikan tugas pokoknya dan bekerja dengan baik. Selain itu, pihak Koordinasi Tingkat Kota dan Kecamatan juga dengan senang hati menjalankan kewajibannya karena mengetahui kewajiban dan komitmennya sebagai pelaksana strategi dan wajib melayani daerah setempat. Selain itu, para ketua RT dan RW selaku pelaksana di lapangan juga sangat bersemangat menyelesaikan Prodama untuk semakin mengembangkan kemajuan lingkungannya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di Kelurahan Setonopande dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Plus, PPTK Sebagai agen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, PPTK berkoordinasi dengan Pokmas, RT, dan RW terdekat dan selanjutnya membina hubungan untuk koordinasi apabila terdapat permasalahan. Koordinasi ini dilakukan dengan tujuan akhir untuk mencapai sasaran pelaksanaan program dan pelaksanaannya juga terkendali secara konsisten. Dalam melaksanakan program pengendalian, PPTK menyelesaikan pengendalian, selain itu PPTK juga mengikutsertakan RT/RW dalam mengatur jalannya program. Melalui koordinasi pelaksanaan program yang dilakukan oleh PPTK, koordinasi pelaksanaan program tidak mengalami kendala sehingga program dapat berjalan dengan baik. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan penggunaan media sosial berbasis web

WhatsApp, mengingat penggunaan media sosial virtual dapat bekerja dengan koordinasi secara cepat dan dimanapun.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dalam komunikasi yaitu komunikasi dan koordinasi yang baik dengan menyelenggarakan rapat dan juga rembuk warga secara konsisten, dimana nantinya oleh semua pihak yang terkait akan tersampaikan ke masyarakat dengan komunikasi yang baik. Dalam sumber daya manusia adalah adanya pegawai yang sudah kompeten dalam bidangnya dan juga petugas pelaksana kegiatan yang bisa memahami dari program pemerintah dan juga sumber daya anggaran untuk pembiayaan prodamas plus.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam komunikasi yaitu penyampain informasi yang dilakukan secara tidak langsung, dan memang ada beberapa warga yang kurang peduli dan tidak mau melibatkan dalam kegiatan program ini, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang peraturan ini, lebih baik diinformasi atau disampaikan secara langsung sehingga tepat pada sasaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari segi korespondensi, sudah berjalan baik dengan adanya sosialisasi bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kediri, mulai dari lurah, dusun, dan ketua RT dan RW se-Kota Kediri. Kemudian Kelurahan Setonopande mengadakan sosialisasi mengundang ketua RT dan RW melakukan rembuk bersama, selain itu Komunikasi yang dilakukan antar pelaksana Prodama Plus dari kelurahan Setonopande, RT dan RW, Pokmas, dan masyarakat berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa hambatan seperti adanya warga yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan prodamas plus selain kesibukan, ada juga beberapa yang memang tidak ingin melibatkan diri untuk mengikuti rembuk warga. Dalam aspek sumber daya manusia dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Plus di Kelurahan Setonopande yaitu Lurah, sekretaris, Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), RT, RW, Pokmas, dan seluruh masyarakat di wilayah Kelurahan Setonopande. Kemudian sumber daya anggaran untuk membiayai pelaksanaan Prodama Plus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kediri. Sikap para pelaksana yang

memfasilitasi, memberikan dukungan, dan mengontrol dalam menjalankan Implementasi Prodama Plus. Dalam aspek disposisi sikap para pelaksana memfasilitasi masyarakat dan memberikan dukungan dalam menjalankan Implementasi Prodama Plus di kelurahan Setonopande, memiliki peran serta mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan, tanggung jawab dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai pelaksana yang baik untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat plus. Dalam aspek ini, struktur birokrasi diterapkan dan dilaksanakan dengan baik dan efektif oleh tim pelaksana Prodama Plus kelurahan Setonopande dengan menjalankan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi utama prosedur pelaksana kebijakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Komunikasi yang dijalankan dengan baik antara pihak Pemerintah Kota Kediri, Kecamatan, Kelurahan Setonopande, serta masyarakat kelurahan Setonopande dalam pelaksanaan kegiatan Prodama Plus. Dalam kegiatan ini warga juga antusias, saling bekerjasama, dan gotong royong melibatkan diri dalam mensukseskan Prodama Plus, meskipun ada warga yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan prodama plus ini selain kesibukan tidak bisa hadir dan terlibat, ada juga beberapa yang memang tidak mau mengikuti rembug warga, akan tetapi kegiatan prodama plus tetap berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan serta manfaatnya untuk bersama. Sikap dari para pelaksana yang memberikan dukungan dalam menjalankan Implementasi Prodama Plus, masyarakat saling bekerjasama dan mendukung dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat plus. Disposisi dari sikap para pelaksana yang memberikan dukungan dalam menjalankan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Plus. Struktur Birokrasi kelurahan Setonopande menjalankan SOP kegiatan program pemberdayaan masyarakat plus dengan efektif dan baik yang sudah sesuai pelaksanaannya tercantum dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Plus.

B. Saran

1. Bagi Instansi (Kelurahan Setonopande Kota Kediri)

Sosialisai Prodamas Plus sebaiknya pihak pelaksana dari kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk lebih ditingkatkan lagi dan diharapkan dapat mempertahankan kualitas sumberdaya manusia. Apabila wilayah setempat diakumulasikan melalui arisan atau pertemuan rapat, dirasa kurang kuat karena tidak semua penghuni bisa mengikuti dan akan menghadiri pertemuan tersebut, sehingga nantinya diyakini sosialisasi akan lebih diperluas, dengan mengarahkan upaya pada acara-acara pertemuan lokal seperti acara pengajian mingguan yang biasa, acara kegiatan kesehatan, atau arisan RT/RW dan arisan ibu-ibu maupun acara non formal lainnya yang dapat menarik masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan prodamas plus ini karena masyarakat menjadi sasaran utama program, untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat perlu adanya cara efektif dan kreatif agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang kegiatan program pemberdayaan masyarakat plus baik dari pengertian, visi/misi program, sasaran, tahapan, manfaat yang dapat diambil oleh masyarakat serta peran masyarakat dalam kegiatan ini.

2. Bagi Masyarakat (Warga Kelurahan Setonopande Kota Kediri)

Diharapkan warga yang ditunjuk langsung dapat mempertahankan kualitas sumberdaya manusia pihak kelurahan yang sudah memilih Masyarakat lokal yang diikutsertakan hendaknya ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan dan pelatihan, mengingat pelaksana gerakan program ini secara langsung berperan sebagai pemimpin program yang mengelola daerah dalam menciptakan, membantu dan mengkoordinasikan daerah dalam melakukan kegiatan. Pentingnya saling memberikan pengembangan dan rencana imajinatif dengan memberikan pembinaan kepada daerah setempat dalam pemanfaatan Prodamas Plus aset melalui kelompok gotong royong yang baru saja diberikan persiapan dari Pemerintah Daerah, menjadikan kepercayaan daerah setempat, dimana nantinya daerah setempat tidak hanya mengandalkan Prodamas Plus secara konsisten agar bisa mengembangkan diri lebih aktif, kreatif dan inovatif.

REFERENSI

- Ahmad Farhan, A. A. (2017). Strategi Pemerintah Kota Kediri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Prodama (Studi Penelitian di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan di Desa Tamanan Rt 01 Rw 03). *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 1(2), 38–67.
- Aswar Amir. 2018. *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Majene (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Desa Balombong Kec. Pamboang)*. Tesis. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- A.W, Widjaja. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : Bumi Aksara
- Djani, W., Kase, P., & Ndoda, Y. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN AMABI OEFETO KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 299–310.
- Dwidjowijoto, R. N. (2006). *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra.
- Sutrisno, D. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 12).
- Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2020.